

POLICY BRIEF

DESAIN MODEL PEMBIAYAAN PADA KAWASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI MENDUKUNG PROGRAM SERASI

Pendahuluan

01. Untuk mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan diperlukan upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui optimalisasi lahan rawa dengan cara meningkatkan produktivitas dan meningkatkan indeks pertanaman.
02. Untuk itu, pada tahun 2019 pemerintah mengembangkan lahan rawa melalui Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Sumatera Selatan 200 ribu hektare, Kalimantan Selatan 120 ribu hektare, Sulawesi Selatan 33,505 ribu hektare, Lampung 25,604 ribu hektare, dan Kalimantan Tengah 25 ribu hektare.

Permasalahan

03. Selain aspek pengairan, permasalahannya adalah dua upaya yang dilakukan berkonsekuensi terhadap penambahan pembiayaan usaha tani dan menyerap tambahan hasil produksi gabah petani dengan harga layak, sehingga kesejahteraannya meningkat.
04. Lokasi lahan rawa yang jauh dari pusat perdagangan dan aksesibilitas kurang menyebabkan petani membayar input lebih mahal dan menjual hasil lebih murah. Untuk mencapai efisiensi dalam pengadaan input dan penjualan hasil, pengembangan lahan rawa memerlukan konsolidasi manajemen dan dikelola menjadi satu kawasan dalam satu manajemen korporasi milik petrani.

Temuan-Temuan Pokok

Kebutuhan Pembiayaan Pertanian pada Kawasan Rawa Program SERASI

05. Pangsa terbesar pendapatan petani di lokasi penelitian Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Barito Kuala adalah dari hasil usaha tani padi, masing-masing 80% - 88% dan 45% - 49%. Di Kabupaten Barito Kuala pangasanya lebih kecil, karena petani hanya melakukan pertanaman padi setahun sekali menggunakan pola sorjan dengan jeruk, dimana pangsa pendapatan jeruk berkisar 28%.
06. Produksi gabah pada kedua kabupaten lokasi penelitian masih berpotensi untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Banyuasin potensi tersebut berasal dari peningkatan produktivitas MT1 dan MT-2, sedangkan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan

dengan meningkatkan produktivitas varietas lokal pada MT1 dan menambah indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200 dengan varietas unggul.

07. Peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman ini membutuhkan tambahan biaya produksi dan penyerapan tambahan hasil. Besarnya biaya secara keseluruhan di Sumatera Selatan Rp5,55 T dan di Kalimantan Selatan Rp3,18 T. Biaya tersebut belum termasuk untuk perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi.

Keberadaan Sumber dan Pola Pembiayaan Pertanian pada Kawasan Rawa Program SERASI

08. Sumber modal untuk usaha tani padi eksisting di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Air Salek 55% modal sendiri dan 45% pinjaman; di Muara Telang 69% modal sendiri dan 31% pinjaman. Di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Barambai 86% modal sendiri dan 14% pinjaman; serta di Mandastana 84% modal sendiri dan 16% pinjaman.
09. Kelembagaan Ekonomi Petani yang ada, kinerjanya masih belum sesuai harapan. Petani yang memanfaatkan lembaga pembiayaan formal dan non formal sebagai sumber modal dan mengasuransikan usaha tani padinya masih terbatas. Peminjaman kredit program KUR untuk modal usaha tani masih belum melibatkan banyak petani. Padahal petani bersedia membiayai pinjaman lebih 3% per bulan dengan pola pembayaran saat panen atau YARNEN.

Desain Pengelolaan Pembiayaan Pertanian pada Kawasan Rawa Program SERASI

10. Petani di kawasan Program SERASI, setuju didirikan korporasi petani dengan syarat memberi manfaat lebih baik bagi petani. Korporasi yang dibentuk berbadan hukum, utamanya koperasi primer dan berpeluang berkembang menjadi koperasi sekunder dan Perseroan Terbatas tergantung kebutuhan dan omset usaha. Pengelola korporasi yang diharapkan berasal dari masyarakat setempat yang memerlukan pembinaan pengelolaan dari luar. Syarat utama SDM pengelola korporasi petani yang akan dibentuk adalah kejujuran dan profesionalitas.
11. Pembiayaan pertanian korporasi diprioritaskan pada unit bisnis sektor hulu (pupuk, pembiayaan, jasa alsintan, dan penangkaran benih) dengan target pasar petani di kawasan dan sektor hilir (beras) dengan target pasar pemerintah dan pasar umum. Dalam jangka pendek dan menengah sumber pembiayaan korporasi dapat berasal KUR. Menurut perkiraan dana KUR masih belum mencukupi, sehingga diperlukan dukungan dana desa (BUMDES), LKMA, dan KEP yang ada lainnya. Pola pembayaran pinjaman yang disukai petani adalah menggunakan sistem yarnen, dan pola pembelian menggunakan sistem tunai.

12. Model korporasi petani yang diciptakan terpisah antara unit manajemen korporasi dengan kelembagaan ekonomi petani yang ada di kawasan. Secara makro dalam lingkup kawasan, kedua komponen merupakan satu kesatuan yang harmonis di bawah koordinasi unit manajemen korporasi petani dan secara bertahap menyatukan unit-unit bisnis unggulan pada KEP serta melakukan perluasan cakupan wilayah kerja.

Implikasi Kebijakan

13. Potensi meningkatkan produktivitas dan Indeks Pertanaman dilakukan dengan pemberian pupuk dan kapur, pengendalian OPT dan Air, pengolahan tanah dengan teknik dan waktu yang tepat. Potensi ini dapat dilakukan melalui pendampingan petugas, seperti SLPTT dan melakukan *demfarm* yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan biofisik setempat, sehingga dapat diadopsi oleh petani setempat.
14. Besarnya kebutuhan tambahan biaya produksi dan penyerapan gabah dari kenaikan hasil besarnya bervariasi yang ditentukan oleh produktivitas, penggunaan produksi, dan sumber modal petani. Untuk itu, agar informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat, maka tetap diperlukan kajian awal untuk daerah-daerah pengembangan baru, sehingga keberlanjutan program menjadi lebih baik.
15. Peningkatan indeks pertanaman saat MT-3 yang selama ini diberakan, hanya baru beberapa petani memanfaatkannya. Komoditas yang sudah ada dan potensi pasar sebaiknya dijadikan dasar pertimbangan untuk pengembangannya. Beberapa komoditas yang dinilai prospektif adalah jagung untuk pakan ternak, ubi jalar, dan sayuran. Ternak sapi dapat dikembangkan karena potensi dedak dan jerami padi sebagai pakan dan kotoran ternak sebagai produk samping dapat digunakan untuk perbaikan kualitas lahan, khususnya untuk pupuk tanaman sayuran.
16. Potensi kelembagaan ekonomi petani yang ada perlu diidentifikasi dan kalsifikasi untuk dilakukan penguatan melalui BIMTEK. Bimtek dapat dilakukan melalui kerja sama antar kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi-UMKM, Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan BIMTEK jangan hanya dilakukan secara seremonial, tetapi yang sifatnya praktek melalui kerja magang dalam waktu 2-3 bulan sesuai kebutuhan. Secara khusus Kementerian Koperasi-UMKM dapat melakukan BIMTEK pembukuan dan manajemen kelembagaan ekonomi berbasis koperasi.
17. Dana PUAP yang dikelola gapoktan dapat ditingkatkan menjadi LKMA yang berbadan hukum melalui pembinaan dan BIMTEK oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi-UMKM dan OJK. UPJA yang ada dibina oleh Kementerian Pertanian menjadi unit bisnis yang berorientasi profit agar bisa berkelanjutan. KUB yang dibentuk, tidak cukup hanya membentuk, tetapi pembinaannya terus

dilakukan, sehingga bisa akses pada sumber pembiayaan dan lakukan usaha yang menguntungkan. Pihak Kementerian Desa melakukan pembinaan dan BIMTEK terhadap pengelola BUMDES. Keharmonisan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat terus dilakukan hingga ke tingkat lapangan.

18. Selama ini sebagian besar sumber pembiayaan usaha tani yang dilakukan petani dari usaha tani sendiri. Untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas tanaman padi serta diversifikasi usaha, prospek bisnis pembiayaan dinilai baik dan masih diperlukan dukungan pembiayaan pihak luar. Selama ini dukungan tersebut diperoleh dari berbagai sumber dengan tingkat bunga bervariasi. Bagi petani tingkat bunga bukan merupakan pertimbangan utama, yang penting adalah syarat pinjaman tidak menyulitkan dan pola pembayarannya saat panen (YARNEN) .
19. Prospek Pemanfaatan KUR untuk pembiayaan usaha tani dan AUTP untuk melindungi usaha tani padi dalam rangka mensejahterakan petani dinilai baik. Oleh karenanya, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan bantuan mediasi seperti yang dilakukan pengurus BUMDES di Desa Telang Rejo Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Selain itu, keberadaan aparat instansi terkait baik pusat maupun daerah dapat mendorong motivasi petani dan mencegah kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak sebagaimana mestinya oleh oknum tertentu, seperti yang harapkan pengelola LKMA di salah satu desa di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan sosialisasi dengan melibatkan pihak terkait masih perlu ditingkatkan. PPL, PKL & KEP yang ada berperan aktif dan secara rutin melakukan pertemuan dengan pihak penyalur KUR dan Jasindo untuk meningkatkan akses petani terhadap program subsidi ini.
20. Potensi bisnis yang dalam waktu dekat dapat direalisasikan adalah memberikan peran Korporasi petani sebagai distributor pupuk seperti yang dilakukan pada ANPER MBN di Kecamatan Rawa Merta Kabupaten Karawang. Selain itu, melakukan usaha penyerapan (pembelian) gabah petani dan mengolah menjadi beras untuk dijual, penyedia pembiayaan, dan layanan jasa alsintan. Diharapkan potensi bisnis yang ada pada tahap awal perlu mendapatkan dukungan berbagai pihak terkait.
21. Unit manajemen korporasi petani merupakan bagian yang terpisah dari KEP yang ada. Mekanisme pembentukannya sebaiknya melibatkan unsur KEP dengan rekam jejak kinerja bisnis dan SDM baik, namun demikian KEP yang ada di kawasan tetap berjalan dengan kesatuan manajemen yang dikordinasikan secara harmonis oleh pihak manajemen korporasi petani. Pengelola korporasi diutamakan dari pihak setempat dengan kriteria jujur dan profesional serta dalam waktu tertentu dan reguler perlu binaan, pendampingan, dan pengawasan.
22. Keberadaan unit manajemen korporasi petani diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan. Oleh karena itu, unit ini harus memiliki

aksesibilitas yang besar terhadap sumber pembiayaan dan pemasaran serta memiliki jaringan kerja yang luas. Dalam jangka pendek, sumber pembiayaan korporasi petani dapat berasal dari dana KUR, Dana Desa, dana LKMA, dan KEP di dalam kawasan. Pemasaran beras dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk memasok kebutuhan ASN, Beras Program (BPNT) dan pasar umum.

23. Ada tiga opsi lembaga korporasi petani di Kawasan SERASI, yaitu: (1) koperasi sekunder yang dibentuk oleh gabungan koperasi primer yang beranggotakan petani individu, yang cikal bakalnya adalah Gabungan Kelompok Tani. Gabungan kelompok tani yang sudah ada saat ini di lokasi SERASI dapat membentuk koperasi primer; (2) Perseroan Terbatas yang didirikan oleh seluruh koperasi primer (jelmaan Gabungan Kelompok Tani) yang ada di wilayah pengembangan SERASI. Pemilik PT atau pemegang saham PT adalah koperasi primer yang sejatinya beranggotakan seluruh petani; dan (3) bentuk PT, hanya saja kepemilikan modalnya adalah gabungan dari modal yang dimiliki oleh para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani atau koperasi primer di wilayah kawasan koperasi dan modal yang berasal dari luar kawasan SERASI. Pilihan lembaga dari luar adalah PT. Mitra BUMDES Nusantara (PT. MBN) dengan kepemilikan saham petani (Gapoktan & BUMDES) 51% dan PT. MBN 49%.